

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik dalam kelebihan ataupun kekurangan yang telah ada serta sebagai dasar untuk menyusun kerangka piker atau arah penelitian ini. Penulis juga mendapatkan referensi dari skripsi dan buku-buku dalam mendapatkan informasi dan landasan teori ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| NO | Nama Peneliti | Lokasi | Metode | Hasil |
|----|--------------------------------|-------------|--------------------------|---|
| 1 | Ravi Dwi Wijayanto (2010) | Jawa Tengah | Data Panel | PDRB mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan |
| 2 | Ketut & Endrayani (2016) | Bali | Data sekunder dan primer | Pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan |
| 3 | Kurnia Dwi Rahmawati (2017) | DIY | Data Time Series | Jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan pengangguran mempunyai pengaruh positif |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---|
| | | | | terhadap kemiskinan di DIY |
| 4 | Irma Setiawati (2017) | Kabupaten Pinrang | Kuantitatif | (PDRB) berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan |
| 5 | Nurul Fadlillah , Sukiman dan Agustin Susyatna Dewi (2016) | Jawa tengah | Deskriptif,survey | IPM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. |
| 6 | Dewi Kurniawati Sunusi, Anderson Kumenaung, Debby Rotinsulu (2014) | Sumatra Utara | Kuantitatif | Pengeluaran Pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan |

2.1 Landasan Teori

2.2.1 Kemiskinan

Ada banyak definisi dan konsep tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan.

Badan Pusat Statistik (BPS) 2018. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah Indonesia mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea ke-empat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini

juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Amartya dalam Canning, (2001) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan (Ravi Dwi,2010).

Menurut (*The World Bank*) Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPP 1.55 dolar AS per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong 'miskin dari segi pendapatan' dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.

Ukuran Kemiskinan

Menurut Rahardjo (2005), secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu “kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif”.

1. Kemiskinan absolut selalu dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai pembelian kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga tersebut dapat dikatakan miskin. Hal ini maksudkan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.
2. kemiskinan relatif, yaitu orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum namun tidak selalu berarti tidak miskin. Walaupun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi jika masih jauh lebih rendah dari pemenuhan kebutuhan hidup sederhana, maka orang atau keluarga tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh lingkungan yang bersangkutan.

Faktor Penyebab Kemiskinan

Secara konseptual, Suharto (2009) menyebutkan bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh empat faktor, yaitu:

a. Faktor individual

Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dari psikologis si miskin. Masyarakat menjadi miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.

b. Faktor sosial

Kondisi – kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis, yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.

c. Faktor Kultural

Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas.

d. Faktor Struktur

Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak accessible sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin.

Jenis-jenis Kemiskinan

Menurut Nurhadi (2007), membagi kemiskinan menjadi tiga jenis dengan variasi yang berbeda, yaitu: kemiskinan ekonomi, kemiskinan sosial dan kemiskinan politik.

1. Kemiskinan Ekonomi

Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam hal ini tidak hanya menyangkut masalah financial saja, tetapi juga meliputi semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

2. Kemiskinan Sosial

Secara sosial, kemiskinan menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal.

3. Kemiskinan Politik

Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuatan dalam pengertian ini mencakup tatanan system politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan resources.

2.2.2 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

PDRB merupakan penjumlahan dari semua harga dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (1 tahun).

Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara penghitungan. Ketiga cara tersebut adalah :

1. Cara Pengeluaran

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlah pengeluaran ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam negara tersebut. Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi dan pengeluaran pemerintah serta pendapatan ekspor dikurangi dengan pengeluaran untuk barang-barang impor.

2. Cara Produksi atau cara produk netto

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian. Dalam menghitung pendapatan nasional dengan cara produksi yang dijumlahkan hanyalah nilai produksi tambahan atau value added yang diciptakan.

3. Cara Pendapatan

Dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional. (Sukirno, 1994: 32).

Adapun manfaat penghitungan nilai PDRB adalah :

1. Mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian. Dari perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu daerah termasuk daerah industri, pertanian atau jasa dan berapakah besar sumbangan masing-masing sektornya.
2. Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Oleh karena nilai PDRB dicatat tiap tahun, maka akan di dapat catatan angka dari tahun ke tahun. Dengan

demikian diharapkan dapat diperoleh keterangan kenaikan atau penurunan apakah ada perubahan atau pengurangan kemakmuran material atau tidak.

Pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2007.(dikutip oleh Wishnu Adhi Saputra, 2011).

2.2.3 IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Indeks Pembangunan Manusia menurut BPS merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia

(masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan melalui perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hasil pembangunan lainnya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara itu, standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita disesuaikan.

Pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap Tingkat Kemiskinan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan

hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

2.2.4 Tingkat Pengangguran

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Oleh sebab itu, menurut Sadono Sukirno (2000) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

Pengangguran akan selalu muncul dalam suatu perekonomian karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah adanya proses pencarian kerja, yaitu dibutuhkan

waktu untuk mencocokkan para pekerja dan pekerjaan. Alasan kedua adalah adanya kekakuan upah. Kekakuan upah ini dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya kebijakan upah minimum, daya tawar kolektif dari serikat pekerja, dan upah efisiensi (Mankiw, 2000:123).

Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Lincoln Arsyad, 1997 dikutip dari (Wishnu Adhi Saputra, 2011) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena kadangkala ada juga pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak

pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah, banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin.

2.2.5 Belanja Pemerintah/Pengeluaran Pemerintah

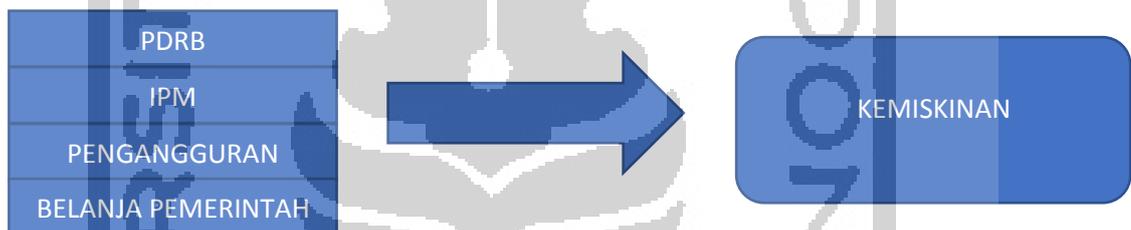
Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan dan memuat keputusan dan pilihan yang dibuat pemerintah guna menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja total pemerintah merupakan penjumlahan seluruh keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat-provinsi-daerah). Pengeluaran pemerintah daerah terlihat dari belanja daerah yang terdapat pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Menurut Bastian (2006) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pelimpahan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk satuan uang untuk periode satu tahun takwim dan condong terhadap tujuan kesejahteraan publik”.

Seberapa besar belanja pemerintah untuk kesejahteraan publik dapat menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kesejahteraan yang meningkat maka pemberantasan kemiskinan disuatu daerah dapat diatasi karena tujuan utama pengeluaran pemerintah salah satunya adalah untuk memakmurkan masyarakatnya.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan

Kesejahteraan yang didapatkan masyarakat dilihat dari seberapa besar pengeluaran pemerintah yang dilakukan dalam mengalokasikan APBD dalam memenuhi kebutuhan masyarakat disuatu daerah. Bastian (2006), APBD dan pelaksanaan kebijakan pemerintah mempunyai tujuan utama untuk kesejahteraan publik sehingga dapat mengurangi jumlah kemiskinan.

2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

1. Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan 2010 diduga mempunyai pengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Indeks Pembangunan Manusia diduga mempunyai pengaruh positif terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Tingkat Pengangguran diduga mempunyai pengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
4. Belanja Pemerintah diduga mempunyai pengaruh positif terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.